

Pembaharuan Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah di Era Global

Oleh
Prof. Suwarsih Madya, Ph.D.

Panitia Seminar Nasional Pendidikan
dalam rangka
Hari Pendidikan Nasional 2004
Badan Litbang Kabupaten Pacitan
Juni 2004

Pembaharuan Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah di Era Global (Oleh Suwarsih Madya)

A. Pendahuluan

Perubahan dalam sektor pendidikan merupakan keharusan sebagai jawaban terhadap tuntutan perkembangan zaman. Mengapa? Karena lewat pendidikan dengan berbagai jenis lewat berbagai jalur, warganegara Indonesia dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Pendidikan selalu terjadi dalam konteks dunia nyata di mana berbagai variabel saling bersentuhan dan berinteraksi secara dinamis, menyuguhkan berbagai tantangan dan sekaligus peluangnya. Pembaharuan pendidikan telah dimulai sejak lama sesuai dengan perkembangan teori pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1960-an pembaharuan pendidikan dipengaruhi oleh teori belajar dan mengajar yang condong ke *behaviourisme*. Kemudian pada decade berikutnya, pembaharuan dirancang kembali dengan orientasi pada tujuan dengan model PPSI. Dengan makin kuatnya pengaruh aliran humanistik, dilakukan lagi upaya untuk mengubah pusat pengajaran dari guru ke anak dan ini dilaksanakan dengan mengenalkan sistem CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) sampai awal tahun 1990. Terakhir juga telah dilakukan upaya pembaharuan dengan gerakan CTL (*Contextual Teaching and Learning*). Semua upaya pembaharuan ini melibatkan pengajaran guru-guru dengan harapan agar perubahan terjadi dalam praktik belajar-mengajar di kelas.

Namun demikian, pengamatan terbatas saya menunjukkan bahwa tidak banyak perubahan yang terjadi di kelas. Kebanyakan proses pembelajaran masih sarat dengan *rote learning* atau hafalan. Kreativitas aparatur pendidikan belum juga tampak mengejawantah dalam perilaku, yang tercermin dalam masih kuatnya budaya menunggu, dan kecenderungan terjadinya kekecewaan atas karena bawahan bertindak terlebih dahulu, meskipun telah ditatar tentang MBS. Mengapa demikian? Dugaan saya adalah bahwa para guru dan aparatur pendidikan lainnya yang telah ditatar sebenarnya belum menangkap roh pendekatan baru yang dikenalkan dan belum ada mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa apa yang dilatihkan benar-benar dilaksanakan. Di samping itu, sering perubahan pendekatan belum diiringi dengan pemenuhan kebutuhan yang timbul sebagai konsekuensinya. Dengan kata lain, mereka mendapatkan pengetahuan baru tetapi pengetahuan tsb belum berhasil mengubah "*mindset*" mereka.

Mindset adalah hasil olah akal. Menurut filosof besar Iman Ghazali, akal merupakan perpaduan harmonis antara rasio dan rasa. Ia merupakan anugerah terbesar dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Keputusan yang dihasilkan melalui pengolahannya pasti merupakan keputusan yang bijaksana dengan dampak yang menguntungkan sebanyak mungkin pihak dalam kurun waktu yang sepanjang mungkin.

Berdasarkan pemahaman inilah lewat paparan ini saya mengajak semua peserta seminar untuk selalu mengubahsuaikan *mindset* pendidikan agar mampu merintis jalan menuju tercapainya visi dan misi pendidikan nasional seperti disebut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dengan kata lain, kita mesti berpikir secara kontekstual sehingga membuat keputusan dan melaksanakannya (bertindak) dalam konteks yang ada; perubahan *mindset* akan mendorong perubahan perilaku. Dengan *mindset* pendidikan yang selalu kontekstual, akan terjadi perubahan nyata yang akan bermuara pada terciptanya masyarakat yang warganya telah atau sedang mengembangkan seluruh potensinya sesuai dengan takdir kapasitasnya. Dalam masyarakat yang demikian, kehidupan dapat berjalan dengan relatif mulus karena setiap peran dalam kehidupan dapat dimainkan dengan efektif, efisien, dan profesional oleh pemain berkualitas tinggi yang mampu merespon secara proaktif dan reaktif terhadap tuntutan perkembangan zaman. Mari kita memulainya dari sekarang.

Terkait dengan ajakan saya tersebut, paparan akan terfokus pada hal-hal yang menurut saya mendasar, dimulai mulai dari pembicaraan tentang konteks yang berlapis dengan ciri-ciri danuntutannya masing-masing, diikuti dengan esensi perubahan *mindset*, dan diakhiri penutup.

B. Konteks Pembaharuan

1. Konteks Global

Abad XXI ini telah diidentifikasi memiliki 6 karakteristik bahwa: (1) *The twenty-first century is knowledge-based*; (2) *The twenty-first century witnesses an increased information flow*; (3) *The twenty-first century witnesses rapid change and impermanence*; (4) *The twenty-first century witnesses an increase in decentralization of organization, institutions, and systems*; (5) *The twenty-first century is people-oriented*; (6) *The twenty-first century witnesses major demographic shifts* (Mulkeen and Tetenbaum, 1987, as cited by Lange, 1990). Implikasi dari keenam karakteristik ini dalam pendidikan berkenaan dengan rekrutmen guru, pergeseran dari pendekatan berpusat pada guru ke pendekatan berpusat pada siswa (*the teacher-centred approach to the learner-centred*), belajar sepanjang hayat, pemelajar yang otonom/mandiri, guru yang otonom/mandiri, dan pemenuhan kebutuhan kelompok minoritas (Lange, 1990).

Fenomena lain terkait dengan ketegangan global. Globalisasi telah mendekatkan orang dari seluruh penjuru dunia melalui teknologi informasi. Akibatnya, eksistensi individual dan kelompok terancam sehingga menimbulkan berbagai ketegangan. Setidaknya ada tujuh macam ketegangan yang telah perlu kita hadapi dan pecahkan dalam abad ini (Delors, 1997), seperti diringkas di bawah:

1. Ketegangan antara kepentingan global dan kepentingan lokal: secara bertahap setiap insan perlu menjadi warga global tetapi menjaga jangan sampai tercabut dari akar budayanya, karena perlu tetap aktif berperan dalam kehidupan bangsa dan masyarakat lokalnya.
2. Ketegangan antara orientasi nilai universal dan nilai perorangan: secara pelan tetapi pasti, dalam batas tertentu, budaya menjadi terglobalisasi. Globalisasi menawarkan sederet keuntungan sekaligus mengandung resiko, termasuk resiko terabaikannya karakter unik setiap insan manusia, yang pada hakikatnya bebas memilih masa depannya sendiri dan mencapai seluruh perkembangan optimal potensinya dalam kekayaan tradisi dan lingkup budayanya sendiri yang, bila tidak dijaga, dapat terancam oleh perkembangan kontemporer.
3. Ketegangan antara tradisi dan modernitas, yang merupakan bagian dari masalah yang sama: bagaimana mungkin menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa mem-belakangi masa lalu, bagaimana otonomi dapat diperoleh dengan tetap mendukung perkembangan bebas orang lain, dan bagaimana kemajuan ilmu dapat diasimilasikan? Tantangan-tantangan ini perlu dijawab dengan bantuan teknologi informasi yang baru.
4. Ketegangan antara pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek: ketegangan ini telah lama terjadi, dan justru sekarang diperparah oleh keserbasesaatan dan keserbacepatan. Opini publik menuntut jawaban cepat dan solusi seketika, sedangkan banyak masalah memerlukan strategi yang cermat, terpadu dan ternegosiasikan untuk mencapai pembaharuan. Berkenaan dengan persoalan inilah kebijakan pendidikan mesti dibuat dengan mempertimbangkan keberlanjutan hakiki programnya.
5. Ketegangan antara kebutuhan berkompetisi pada satu sisi dan kepedulian terhadap pemerataan kesempatan pada sisi lain: persoalan ini telah dihadapi sejak awal abad ini oleh pembuat kebijakan social-ekonomi dan pembuat kebijakan pendidikan. Berbagai solusi telah sering diusulkan tetapi tidak pernah tuntas. Tekanan untuk berkompetisi diduga telah menyebabkan mereka yang berkuasa kehilangan visi tentang misi mereka, yaitu misi untuk memberikan kepada setiap orang alat/sarana untuk dapat meraih keuntungan penuh dari setiap kesempatan yang ada. Untuk mengatasi masalah ini tiga kekuatan hendaknya dipadukan: *kompetisi*, yang memberikan insentif; *kerja sama*, yang memberikan kekuatan; dan *solidaritas*, yang mempersatukan.
6. Ketegangan antara perluasan luar biasa ilmu pengetahuan dan kapasitas manusia untuk mengasimilaskannya: kurikulum telah sarat muatan, tetapi ada godaan untuk menambah jumlah bidang studi, seperti pengetahuan diri (*self knowledge*), cara-cara menjamin kesehatan fisik dan psikologis atau cara-cara meningkatkan pemahaman terhadap lingkungan alam dan menjaga kelestariannya. Maka strategi pembaharuan harus mencakup penentuan pilihan, dengan tetap mengingat pentingnya melestarikan ciri-ciri pendidikan dasar yang membelajarkan murid dalam suasana yang menyenangkan dan mengasyikkan untuk meningkatkan kehidupannya melalui ilmu pengetahuan, eksperimen, dan pengembangan budaya mereka.

7. Ketegangan antara kebutuhan spiritual dan material: 'moral' sampai saat ini tampaknya masih merupakan dambaan bangsa dunia. Maka merupakan tugas mulia pendidikan untuk mendorong setiap orang untuk bertindak sesuai dengan tradisi dan keyakinannya dan menghormati kemajemukan, dan mengangkat pikiran dan semangatnya ke tataran universal serta dalam hal tertentu mentransendensikan dirinya. Dapat dikatakan bahwa kelangsungan hidup umat manusia tergantung pada keberhasilan mencapai hal ini.

Untuk dapat mengatasi masalah yang timbul akibat ketegangan-ketegangan di atas, pendidikan abad ini hendaknya diselenggarakan dengan 4 pilar penyangga berikut (Delors et al, 1997): *learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be*. Butir-butir rekomendasi yang terkait dengan keempat pilar ini adalah sebagai berikut:

- *Learning to know* dilaksanakan dengan memadukan pengetahuan yang cukup luas dengan kesempatan mempelajari secara mendalam sejumlah kecil bidang studi. Hal ini juga berarti belajar untuk belajar (*learn to learn*), agar dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh praktik pendidikan seumur hidup.
- *Learning to do* ditujukan untuk memperoleh tidak hanya keterampilan okupasional tetapi juga, lebih luas lagi, kompetensi untuk menangani berbagai situasi dan untuk kerja kelompok. *Learning to do* juga berarti belajar berbuat bagi kawula muda dalam berbagai pengalaman sosial dan kerja yang mungkin informal, sebagai akibat dari konteks lokal atau nasional, atau yang mungkin formal, yang melibatkan kursus-kursus, dan perpindahan studi dan pekerjaan.
- *Learning to live together* dengan mengembangkan pengertian/pemahaman terhadap orang lain dan apresiasi terhadap kemerdekaan—melaksanakan proyek-proyek kerja sama dan belajar mengatasi konflik—dengan semangat menghormati nilai-nilai kemajemukan, saling pengertian dan kedamaian.
- *Learning to be* ditujukan untuk secara lebih baik mengembangkan kepribadian seseorang dan mengembangkan kemampuan untuk bertindak dengan otonomi yang makin besar, disertai penilaian dan tanggung jawab pribadi. Sehubungan dengan hal ini, pendidikan tidak boleh melupakan aspek apapun dari potensi seseorang: ingatan, penalaran, rasa keindahan, kapasitas jasmani dan keterampilan komunikasi.
- Sistem pendidikan formal cenderung menekankan pemerolehan pengetahuan dengan mengorbankan jenis-jenis belajar yang lain; tetapi sekarang sangatlah penting untuk memahami pendidikan secara lebih komprehensif. Visi demikian seyogyanya menjadi bahan masukan dan menjadikan pedoman bagi pembaharuan dan kebijakan pendidikan masa depan, dalam kaitannya dengan isi dan metoda.

Keempat pilar hendaknya dipahami sebagai satu kesatuan utuh dan pemahaman yang demikian akan mendorong kita untuk belajar sepanjang hayat, mengembangkan berbagai kemampuan, keahlian, dan keterampilan, bukan sekedar mencari sertifikat atau ijazah, dan akhirnya mengambil berbagai manfaat untuk diri kita sendiri dan untuk sesama serta untuk kelestarian imbangan alam sekitar.

Agar kita mampu belajar sepanjang hayat, kita perlu mengembangkan kapasitas belajar, yang memiliki unsur-unsur kunci berikut (Duhon-Selss, Sells, and Mouton (1997: 5): *confidence* (rasa kendali dan penguasaan seseorang terhadap badan, perilaku, dan dunia; rasa seseorang bahwa kemungkinan dia berhasil lebih besar daripada kemungkinan gagal dan orang lain akan menolongnya), *curiosity* (rasa bahwa mencari tentang sesuatu itu positif dan menimbulkan kesenangan), *intentionality* (keinginan dan kapasitas untuk memiliki pengaruh, dan menindaklanjutinya secara gigih, dan hal ini terkait dengan rasa mampu dan efektif), *self-control* (kemampuan mengatur dan mengendalikan tindakan sendiri secara tepat; rasa kendali dalam), *relatedness* (kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain berdasarkan rasa saling pengertian), *capacity to communicate* (keinginan dan kemampuan untuk secara verbal bertukar gagasan, perasaan, dan konsep dengan orang lain, yang berarti kepercayaan pada orang lain dan kesenangan dalam berhubungan dengan mereka), dan *cooperativeness* (kemampuan untuk mengimbangkan kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain dalam kegiatan kelompok (Goleman, 1995).

Terkait dengan hal ini adalah pentingnya pengetahuan-diri yang mengandung unsur-unsur berikut (Parham & Starkovich, 1997: 25-26): *Self-awareness* (kemampuan mengamati diri sendiri dan mengenali perasaannya sendiri, mengenali hubungan antara pikiran, perasaan, dan reaksi), *personal decision-making* (kemampuan memeriksa tindakannya sendiri dan mengetahui konsekuensinya, bahwa pikiran atau perasaan mengendalikan keputusan), *feelings management* (mengenali penyebab perasaan, menemukan cara menangani rasa takut, kecemasan, kemarahan, dan kesedihan), *stress handling* (penghargaan pada nilai latihan, metode penyadaran), *empathy* (pemahaman tentang perasaan dan kepedulian orang lain dari perspektif mereka), *communications* (kemampuan menyampaikan perasaan dan pikiran secara efektif, kemampuan dan kemauan menjadi pendengar yang baik dan penanya yang baik), *self-disclosure* (keterbukaan dan kepercayaan pada orang lain), *insight* (pengenalan terhadap pola kehidupan dan reaksi emosional diri sendiri dan orang lain), *self-acceptance* (penerimaan diri dengan merasa bangga terhadap dan melihat diri sendiri secara positif, dengan kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dan kadang kekonyolan diri sendiri), *personal responsibility* (tanggung jawab pribadi, keikhlasan menerima konsekuensi keputusan dan tindakannya sendiri), *assertiveness* (kemampuan untuk menyatakan kepedulian dan perasaan sendiri tanpa kemarahan atau kepasifan), *group dynamics* (tahu kapan dan bagaimana memimpin, kapan ikut), *conflict resolution* (kemampuan menyelesaikan konflik dengan orang lain).

Dengan kapasitas belajar dan pengetahuan-diri di atas, kita akan benar-benar dapat menjadi orang yang mandiri atau otonom, yaitu orang yang memiliki kemampuan mengendalikan hidupnya demi memenuhi kebutuhan dan aspirasinya sendiri (Arnold, 1999). Mengadaptasi gagasan Dickinson (1993, dalam Tudor, 1996: 20), orang otonom adalah orang yang: (1) memahami apa yang dikerjakannya, (2) mampu merumuskan tujuan hidupnya, (3) mampu memilih dan menggunakan strategi dalam memecahkan masalah hidupnya, (4) mampu memantau efektivitas startegi tsb, dan (5) mampu melakukan evaluasi-diri.

Di samping semua gagasan-gagasan di atas, abad ICT ini menuntut kita semua, aparatur pendidikan, untuk “melek ICT”, terutama teknologi komunikasi dan informasi (ICT), dan mahir berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Literasi ICT akan membantu kita untuk mengakses dan memanfaatkan informasi dengan cepat demi peningkatan kualitas diri kita. Sementara itu, kemahiran berbahasa Inggris akan mendukung pemanfaatan literasi ICT dan upaya menggalang jejaring kerja dengan mancanegara.

Yang perlu selalu kita ingat adalah bahwa penerapan gagasan-gagasan di atas di Indonesia perlu diletakkan dalam konteks nasional, yaitu konteks NKRI, sehingga dapat dicegah lahirnya raja-raja kecil di daerah. Saya yakin kita semua tetap menginginkan keutuhan dan kejayaan NKRI. Maka mari kita cermati konteks nasional kita terutama dalam kaitannya dengan urusan pendidikan.

2. Konteks Nasional

Gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998 telah mengubah kehidupan ebrbangsa dan bernegara kita dari sistem sangat sentralistik ke sistem desentralistik. Kita sekarang telah memiliki landasan hukum untuk melakukan demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah, yaitu UU No. 22/1999. Hanya dengan tingkat kemandirian individu diiringi *mindset* kontekstual seperti tersebut di atas, kita akan berhasil melaksanakan ketiganya dengan tetap menjaga keutuhan NKRI menuju kejayaan bangsa yang bermartabat dan berperadaban. Dalam konteks ini, kita dapat menyederhanakan pengertian tentang kemandirian sebagai kemampuan membuat keputusan dalam konteks yang ada dan kesiapan bertanggung jawab menghadapi konsekuensi keputusan tsb.

Selain menuntut kemandirian, pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem desentralistik yang dijiwai dengan demokrasi menuntut warga daerah untuk mengembangkan kreativitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara konseptual, kontekstual, moral keagamaan dan kebangsaan. Dengan demikian, keragaman bertindak akan selaras dengan kemajemukan masyarakat kita tetapi masih tetap dalam kerangka integrasi NKRI. Terkait dengan hal ini adalah tuntutan bahwa aparatur pendidikan perlu tanggap, terbuka, transparan, dan akuntable.

UU No. 22/1999 juga mengamanatkan pelimpahan ke daerah kewenangan menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, suatu kewenangan yang berimplikasi tugas mulia sekaligus tanggung jawab yang besar. Dalam konteks ini, telah diberlakukan landasan hukum pendidikan, yaitu UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, yang wajib kita pahami isi dan jiwanya agar kita dapat menyesuaikan *mindset* pendidikan kita. Selanjutnya, kita juga perlu mempelajari dengan cermat semua Peraturan Pemerintah terkait, yang tidak lama lagi akan selesai disusun, agar kita dapat melaksanakan tugas mulia tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat dan bangsa serta kemanusiaan. Mengaitkan pelaksanaan tugas dengan perkembangan ipteks, kita juga dituntut untuk memahami implikasi era ICT bagi pelaksanaan tugas tersebut. Dengan makin bertambahnya penduduk, makin berkurangnya SDA, dan belum meratanya SDM yang berkualitas, serta masih rapuhnya kekuatan finansial, kita perlu selalu menyadari pentingnya melakukan sinergi dengan berbagai pihak. Di atas semua ini, semua yang terlibat dalam birokrasi perlu melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, terutama transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, dan profesionalitas.

C. Esensi Perubahan *Mindset* Pendidikan

Dua butir terpenting dalam UU No. 20/2003 akan menjadi pijakan utama dalam perubahan *mindset* pendidikan kita, yaitu butir (1) dan (2) dari Pasal 1 seperti dikutip di bawah.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Ps 1 butir 1)

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. (Ps 1 butir 2)

Rumusan dua butir di atas menyiratkan bahwa peserta didik ditempatkan sebagai subjek dalam proses pendidikan yang suasananya diciptakan sedemikian rupa sehingga kondusif pada terjadinya pembelajaran. Dalam situasi demikian, seluruh potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal—potensi otaknya, hatinya dan raganya serta sosialnya, yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Selanjutnya, dalam proses pendidikan nilai-nilai asli Indonesia dan nilai-nilai agama dijunjung tinggi dan begitu juga keragaman, tetapi pada waktu yang sama dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan zaman. Bila diterapkan dalam konteks manajemen strategik sekarang ini, sebagai anggota organisasi pembelajaran setiap staf juga perlu diperlakukan sebagai pusat proses pengembangan sehingga aspirasi, pikiran, pendapat, dan perasaannya yang sangat dipengaruhi oleh pembawaan kepribadiannya, perlu selalu dipertimbangkan oleh pimpinan. Dengan demikian, semua generasi akan berkembang terus untuk menjadikan dirinya manusia Indonesia seutuhnya seperti yang telah lama dicita-citakan, yaitu manusia yang berkembang dari segi estetika, etika, logika, kinestetika, dan sosial kebangsaan—manusia Indonesia seutuhnya, seperti tersirat dalam Pasal 3, UU No. 20/2003 yang kutipannya akan disajikan kemudian.

Untuk dapat mendukung berkembangnya manusia yang demikian, diperlukan penataan yang rapi mendasar baik secara konseptual maupun kontekstual dalam segala aspek penyelenggaraan pendidikan. Hal ini memerlukan cara berpikir yang dijiwai oleh prinsip: *Structure follows function; Facilities and equipment follow programs; The “what” is always related to the “why”*. Kenyataan cenderung masih jauh dari prinsip-prinsip ini. Salah satu penataan adalah penetapan standar nasional pendidikan, yang dirumuskan (UU No. 20/2004 Pasal 35, ayat 1) sebagai berikut.

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Dapat dilihat dalam ayat (1) di atas bahwa standar nasional pendidikan mencakup asupan, proses, dan keluaran, serta penilaian. Terkait dengan ini adalah rumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang perlu dilakukan secara kontekstual berlapis dan dinamis. Secara berkesinambungan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap terpenuhinya SPM yang demikian. Sebagai contoh, persoalan asupan menyangkut kurikulum (ketersediaan & kelengkapan dokumen), guru (jumlah, kualifikasi, pengembangan, pengalaman), sarana & prasarana (kuantitas dan kualitas), dan siswa (kualifikasi masuk). Persoalan proses perlu dimonitor dan evaluasi untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan dalam Pasal 4, UU No. 20/2003 seperti dikutip di bawah.

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip di atas, diperlukan: (1) guru/pendidik yang berkualitas tinggi, (2) orangtua murid yang memiliki aspirasi pendidikan yang tinggi, (3) masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan, dan (4) Pemerintah/Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap pendidikan.

Mengingat bahwa guru/pendidik merupakan kunci penentu dalam keberhasilan pembelajaran, program pengembangan guru perlu diberi prioritas dalam beberapa tahun mendatang. Dengan pengembangan yang berkelanjutan, baik secara mandiri maupun terprogram, para guru akan menjadi guru yang (1) menguasai berbagai alternatif pedagogis sehingga dapat memainkan peran sebagai fasilitator, (2) memiliki sikap positif terhadap pentingnya belajar sepanjang hayat dan keterampilan melaksanakannya, (3) memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan eksperimentasi, berani mengambil resiko, memiliki otonomi dan bersikap fleksibel, (4) menikmati kebebasan memutuskan yang terbaik bagi anak didiknya, dan (5) memiliki kepekaan terhadap kebutuhan kelompok minoritas dan kesiapan

menjamin terpenuhinya kebutuhan keragaman budaya (baca Breen, 1987 dan Lange, 1990). Dalam melakukan pengembangan guru, ada baiknya kita mempertimbangkan saran Lange (1990) bahwa pengembangan guru hendaknya: (1) berbasis lapangan, (2) berpusat pada masalah sehingga memerlukan sikap reflektif, (3) tanggap terhadap tuntutan ipteks, (4) memberi kesempatan untuk berbagi pengalaman agar dapat belajar dari pengalaman terbaik, (5) bersifat *developmental*, (6) berbasis kompetensi, (7) menekankan kepakaran tinggi, dan (8) berkelanjutan dan berkesinambungan.

Dengan pengembangan demikian, diiringi dengan pemberian kesejahteraan yang memadai dan perlindungan profesi yang kuat, para guru dapat menjadi tumpuan utama bagi tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan nasional, seperti dikutip di bawah.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU No. 20/2003 Pasal 3).

Ciri-ciri manusia Indonesia yang tersirat dalam kutipan di atas menunjukkan pencakupan pengembangan semua potensi kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual-keagamaan (kemampuan dan kemauan membuat keputusan-keputusan hidup berdasarkan ajaran agama yang dianut), kecerdasan intelektual (kemampuan menyerap, mengolah, dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah), kecerdasan emosional (kesadaran-diri dan pengendalian gejala hati, kegigihan, semangat, motivasi-diri, empati, dan keterampilan social)(Goleman, 1995 lewat Duhon-Sells, Sells, dan Mouton, 1997), dan kecerdasan kinestetik-ragawi (kelenturan otot untuk melakukan tugas ragawi). Terkait dengan ini adalah konsep multi-kecerdasan (Gardner, 1994), yang mencakup kecerdasan bahasa, logis-matematis, musikal, spasial, kinestetik-ragawi, intrapribadi, dan antarpribadi. Perkembangan dasar potensi kecerdasan multi-dimensi ini mesti dicapai sebagai *output*, yang kemudian digunakan sambil terus diasah sebagai *outcomes* dalam kehidupan nyata.

Namun demikian, penumpuan harapan kepada guru seperti disebut di atas hendaknya diiringi dengan kesadaran tinggi bahwa pencapaian hasil pembelajaran juga dipengaruhi faktor lain dalam asupan, proses dan lingkungan. Jika semua faktor penentu mendukung secara positif, maka hasilnya akan positif juga, dan jika ada faktor yang menghambat, maka hasilnya pun tidak akan seperti yang diinginkan; jadi, penerapan alur berpikir sebab-akibat secara kontekstual atau alur berpikir sistemik. Dengan kesadaran demikian, keadilan dalam menilai keberhasilan pembelajaran (pendidikan) akan dapat ditegakkan.

Di samping itu, perlu sangat disadari bahwa pencapaian mutu tinggi memerlukan usaha keras lewat berbagai upaya dalam kurun waktu yang cukup lama, mulai dari taraf mutu lokal, ke taraf nasional, dan akhirnya ke taraf internasional. Para pejabat yang memulai membeani penyelenggaraan pendidikan secara mendasar sekarang mungkin belum akan menikmati hasilnya saat masih menjabat, bahkan mungkin harus merelakan bahwa cucu-cucunya yang akan menikmatinya. Hal ini terkait dengan hakikat pendidikan itu sendiri, yang bidang garapannya menyangkut manusia dengan segala keunikan individualnya dalam konteks kehidupan yang ragam pula dengan perubahan terus menerus.

Salah satu strategi pengembangan hendaknya menjamin keseimbangan tercapainya unggulan kompetitif dan unggulan komparatif. Unggulan kompetitif perlu dicapai untuk memenuhi tuntutan persaingan global, sedangkan unggulan komparatif untuk memenuhi tuntutan pemenuhan kebutuhan mengembangkan potensi SDM dan SDM yang ragam dari banyak segi.

Untuk semua ini diperlukan upaya membangun sinergi semua komponen yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari unsur konseptor (para pakar bidang studi, pendidikan, dan pembelajaran; organisasi profesi), pengambil kebijakan (para birokrat), pelaksana kebijakan (praktisi di lapangan), dan *stakeholders* eksternal sebagai pengguna lulusan dan pemerhati pendidikan.

D. Kesimpulan dan Penutup

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan dalam konteks lokal, nasional, dan internasional, yang masing-masing memiliki tuntutan yang masing-masing yang perlu dijawab dalam konteks yang ada dengan segala daya dan kendalanya. Dengan makin berkurangnya SDA dan masih belum optimalnya pengembangan kualitas SDM secara merata, tugas menyelenggarakan pendidikan tersebut sungguh tidak ringan dan oleh karenanya memerlukan pengerahan segala daya dan upaya untuk meraih keberhasilan yang diinginkan.

Dalam rangka memperingati Hardiknas 2004 di Kabupaten Pacitan, saya mengajak semua peserta seminar ini untuk mulai memikirkan dan mempertimbangkan konsep-konsep dan gagasan-gagasan yang saya paparkan di atas, dan memperbaharui dan membulatkan tekad untuk melakukan berbagai upaya pembaharuan pendidikan dalam konteks yang ada melalui sinergi semua komponen terkait dengan berpegang pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam dinamika kehidupan yang ada.

Akhirul kalam, marilah kita selalu menundukkan kepala dan merendahkan hati kita untuk memohon hidayah dan taufik serta kekuatan kepada Allah swt. agar pembaharuan pendidikan dapat benar-benar terlaksana sehingga memuluskan jalan menuju terbentuknya masyarakat madani Indonesia. (Amien)

Pacitan
S.M. Juni 2004

Bibliografi

- Arnold, J. (1999). *Affect in Language Learning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cuevas, P.C. & Gardiner, J.S. (1997). Conflict resolution: implementing peace education. Dalam *Exploring Self Science Through Peace Education and Conflict Resolution*. (Ed. Duhon-Sells, R.). Lewiston: The Edwin Mellen Press.
- Delors, J. (1997). *Learning: the Treasure Within*. Paris: UNESCO.
- Duhon-Sells, R., Sells, H.C. dan Mouton, A. (1997) Peace education: enhancing caring skills and emotional intelligence in children. Dalam *Exploring Self Science Through Peace Education and Conflict Resolution*. (Ed. Duhon-Sells, R.). Lewiston: The Edwin Mellen Press.
- Gardner, H. (1993). *Multiple Intelligences*. New York: BasicBooks.
- Lange, D.L. (1990). A blueprint for a teacher development program. Dalam *Second Language Teacher Education*. (Eds. J.C. Richards & D. Nunan). Cambridge: Cambridge University Press.
- Madya, S. (1999). Menuju Otonomi Pendidikan. Makalah disajikan Seminar Nasional Kependidikan, dalam rangka HUT PGRI ISPI Yogyakarta, Yogyakarta, 8-10 November 1999.
- Madya, S. (2000). *Developing A Competence-Based Curriculum for Indonesian Schools In a Effort to Answer the Global Challenge*. Makalah disajikan dalam A Workshop on Curriculum and Assessment, Balitbang, Depdiknas, Jakarta, 9-10 November 2000
- Madya, S. (2000). *Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan implikasi-implikasinya*. Makalah disajikan dalam Penataran Guru SLTP Yayasan Katolik Pangudi Luhur YKPI se Jawa, Bandung, 2002

- Madya, S. (2004). *Pembelajaran Bahasa Inggris di Indonesia: Suatu Tinjauan Reflektif*. Pidato Guru Besar dalam bidang ilmu pengajaran bahasa Inggris. Yogyakarta: UNY.
- Parham, J. dan Satrkovich, D. (1997). Self Science. Dalam *Exploring Self Science Through Peace Education and Conflict Resolution*. (Ed. Duhon-Sells, R.). Lewiston: The Edwin Mellen Press.
- Pruet, P. dan Cooley, L. (1997). Multiple Intelligence. *Exploring Self Science Through Peace Education and Conflict Resolution*. (Ed. Duhon-Sells, R.). Lewiston: The Edwin Mellen Press.
- Richards, J. & Lookhart, C. (1996). *Reflective Teaching in Second Language Classrooms*. Cambridge: CUP.
- Rogers, C.R. (1983). *Freedom to Learn*. 2nd Ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Sternberg, R.J. (1984). A contextualist view of the nature of intelligence. Dalam *Changing Conceptions of Intelligence and Intellectual Functioning: Current Theory and Research*. New York etc.: Elsevier Science Publishers B.V.
- Suyanto (1999). *Pradigma Baru Sistem Pendidikan Abad 21*. Makalah disajikan pada Seminar Pendidikan Nasional Tahun 1999, ISPI DIY - Primagama, 8-10 November 1999.
- Suyanto dan Djihad Hisyam (2000). *Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III: Refleksi dan Reformasi*. Yogyakarta: Adicita.
- Tudor, I (1996). *Learner-centredness as Language Education*. Cambridge: Cambridge University Press.